



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



BULETIN

KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

4

AGUSTUS 2025

@Copyright | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan



KUNJUNGAN KORWIL
PERADI KALSEL-TENG



AUDIENSI BERSAMA
BUPATI BARITO KUALA



HARMONISASI
RANPERDA KAB TAPIN

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Kebersamaan dan Integritas Ditekankan dalam Apel Pagi Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Apel Pagi pada Senin (25/8/2025). Apel yang rutin digelar setiap awal pekan ini menjadi sarana evaluasi dan penguatan semangat kerja seluruh jajaran.

Apel pagi ini diikuti oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kehadiran seluruh jajaran tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, sekaligus mempererat kebersamaan antarpegawai.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari, sementara posisi Pemimpin Apel diamanahkan kepada Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Ikhwan Ridhani.

Dalam amanatnya, Dewi Woro Lestari menyampaikan apresiasi atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, baik peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia maupun Hari Pengayoman ke-80.

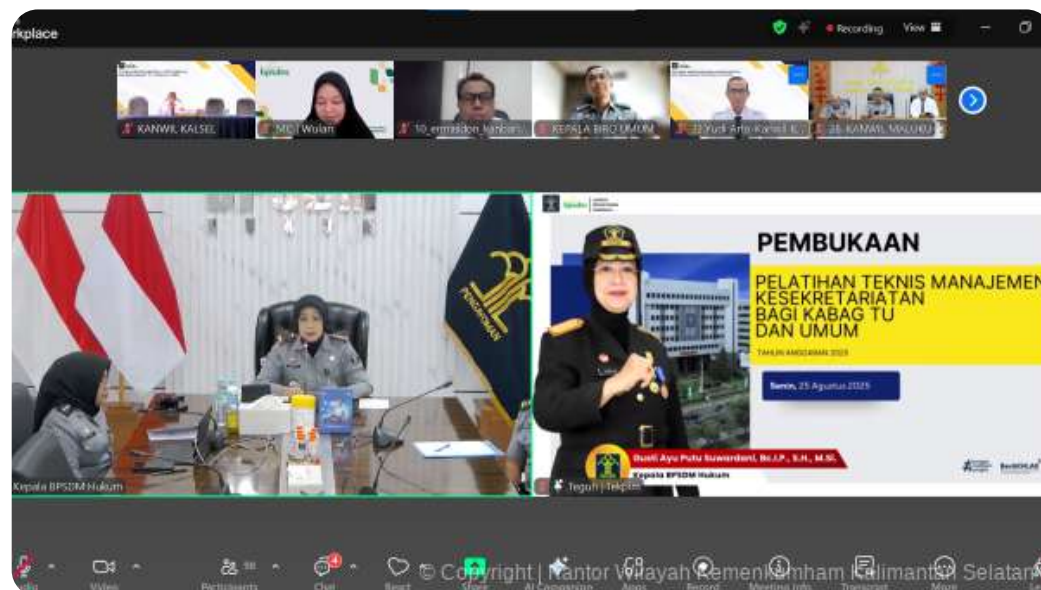
“Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan seluruh pegawai, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia mengingatkan agar setiap unit kerja terus memantau progress dan menjaga semangat kebersamaan.

“WBK adalah komitmen bersama. Kita harus saling mengingatkan dan memastikan langkah-langkah yang kita lakukan selalu terukur dan berkesinambungan,” tambahnya.

Apel pagi ini ditutup dengan harapan bahwa seluruh jajaran dapat menjalani pekan kerja dengan penuh semangat, soliditas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tingkatkan Kompetensi, Kabag TU dan Umum Kemenkum Kalsel Ikuti Pelatihan Manajemen Kesekretariatan



Banjarasin, Humas_Info – Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rustam Sakka, mengikuti kegiatan Pembukaan Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum di lingkungan Kementerian Hukum yang diselenggarakan secara daring pada Senin (25/08/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum, sebagai upaya untuk memperkuat peran kesekretariatan dalam mendukung tata kelola organisasi yang efektif.

Kehadiran Rustam Sakka dalam pelatihan ini didasarkan pada Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Nomor W.19-UM.03.07-2452 tanggal 19 Agustus 2025. Dalam surat tersebut, Rustam ditugaskan mengikuti pelatihan sejak tanggal 25 Agustus hingga 9 September 2025, dengan metode pembelajaran jarak jauh.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pelatihan manajemen kesekretariatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya para Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

“Melalui pelatihan ini, diharapkan peserta dapat menguasai pengelolaan administrasi perkantoran modern, memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung kesekretariatan, serta memperkuat peran Kabag TU dan Umum sebagai motor penggerak tertib administrasi dan pelayanan internal yang efektif,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa dinamika perubahan organisasi saat ini menuntut adanya pemimpin administratif yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif, responsif, dan mampu mengambil keputusan yang tepat di tengah kompleksitas birokrasi. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini dirancang tidak sekadar memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga praktik manajerial yang dapat langsung diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.

Pelatihan Teknis Manajemen Kesekretariatan bagi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum ini akan berlangsung hingga 9 September 2025. Selama periode pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi mengenai tata kelola administrasi modern, strategi kepemimpinan administratif, serta penerapan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kesekretariatan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi dan peningkatan kapasitas yang berdampak positif terhadap kualitas pelayanan internal di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum.

Rapat Harmonisasi: Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab HST Samakan Persepsi Raperbup Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar rapat harmonisasi atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (25/08/2025) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, didampingi tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dua Ranperda yang menjadi pembahasan yaitu Ranperda tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda tentang Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kurang Salur kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menegaskan bahwa harmonisasi Ranperda tidak hanya bertujuan menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan agar regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Proses harmonisasi Ranperda harus menghasilkan aturan yang jelas, teratur, dan implementatif. Tidak hanya menekankan pada keselarasan dengan peraturan di atasnya, tetapi juga meninjau sistematika dan isi materi supaya membawa dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Rapat harmonisasi ini menjadi tahap krusial sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Melalui pendampingan dan telaah dari Kanwil Kemenkum Kalsel, diharapkan kedua Ranperda tersebut dapat menjadi landasan pengelolaan bagi hasil pajak yang transparan serta mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa.



Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi, Pemkab HST Samakan Persepsi Raperbup Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Penyerahan dilakukan dalam rapat harmonisasi pada Senin (25/08/2025) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil.

Dua Ranperda yang telah melalui proses harmonisasi yaitu Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Tata Cara Penetapan dan Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kurang Salur kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025. Hasil harmonisasi tersebut diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan pembahasan bersama DPRD.

Dalam arahannya, Meidy Firmansyah menekankan bahwa harmonisasi Ranperda tidak hanya berfokus pada kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga memastikan aturan yang disusun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

“Harmonisasi Ranperda bukan sekadar penyesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, melainkan juga memastikan lahirnya regulasi yang berkualitas, runtut, serta mudah dilaksanakan, dengan substansi yang berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dengan penyerahan hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat segera membawa Ranperda ke tahap pembahasan selanjutnya bersama DPRD. Kehadiran dua regulasi tersebut akan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan bagi hasil pajak yang transparan serta mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa.

Dekatkan Akses Keadilan, Kemenkum Kalsel Audiensi Bersama Bupati Barito Kuala Siap Bentuk Posbankum



Marabahan, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melaksanakan audiensi bersama Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, pada Senin (25/8) di Rumah Dinas Bupati Barito Kuala. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan pembinaan hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan.

Audiensi turut dihadiri Tim Kerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Paralegal Justice Award dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabag Hukum, Camat Marabahan, serta jajaran terkait.

Dalam audiensinya, Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum merupakan langkah konkret untuk mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat. Posbankum nantinya akan memberikan layanan berupa informasi hukum, mediasi dan negosiasi, pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, serta rujukan advokasi.

“Pos Bantuan Hukum ini menjadi bukti nyata bahwa hukum hadir di tengah masyarakat. Harapan kami, ke depan setiap desa dan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dapat memiliki Posbankum sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses keadilan,” ujar Alex.

Kakanwil juga menambahkan bahwa selain program Posbankum, Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung daerah dalam aspek lain, seperti perlindungan kekayaan intelektual serta pendampingan dalam proses pembentukan produk hukum daerah melalui analisis hukum hingga harmonisasi produk hukum daerah.

Bupati Barito Kuala, Bahrul Ilmi, menyambut baik inisiatif ini dan memberikan apresiasi atas program yang disampaikan. Menurutnya, program Posbankum ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Barito Kuala, khususnya dalam penyelesaian konflik di tingkat lokal.

“Dengan adanya Posbankum di tingkat desa dan kecamatan, berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu ke tingkat yang lebih tinggi. Pemerintah daerah mendukung penuh inisiatif ini dan akan menindaklanjutinya dengan menyiapkan peserta untuk mengikuti pelatihan paralegal di setiap daerah,” ungkap Bahrul.

Audiensi ini menandai sinergi antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat akses keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai garda terdepan layanan hukum di tingkat lokal.

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan 27 Sertifikat Merek untuk IKM Binaan Disperin Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan penyerahan sebanyak 27 sertifikat merek kepada Dinas Perindustrian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyagh dan Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, Senin (25/8). Sertifikat merek tersebut diterima oleh Plt. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Muttaqin, yang hadir mewakili Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.

Sebanyak 27 sertifikat merek yang diserahkan merupakan hasil fasilitasi pendaftaran merek bagi Industri Kecil Menengah (IKM) binaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diajukan pada 2024. Dari setiap kabupaten/kota, beberapa IKM yang menerima antara lain Amplang Aisyah dari Kotabaru, Maliqasultan Bakery dari Tanah Bumbu, Rumaisyah Bakery & Cake dari Tanah Laut, MRB dari Barito Kuala, IB dari Banjarmasin, Kopi Latat dari Hulu Sungai Tengah, Cap Dewi Yulianti dari Hulu Sungai Selatan, Purun Craft dari Hulu Sungai Utara, Cemis (Cemilan Syar'i) dari Balangan, Namu Bakeshop dari Tabalong, serta ABBA Cokelat dari Banjarbaru, dan lainnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat merek ini merupakan bentuk nyata dukungan Kemenkum terhadap penguatan hak kekayaan intelektual bagi pelaku IKM di Kalimantan Selatan.

“Dengan kepemilikan merek, para pelaku usaha dapat lebih percaya diri, meningkatkan daya saing, serta memperoleh perlindungan hukum atas produk yang dihasilkan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kabid Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Disperin Kalsel, Firman Muttaqin, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia berharap sertifikat merek yang diterima dapat menjadi motivasi bagi IKM binaan untuk terus berinovasi dan memperluas pasar, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.





Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Webinar OKE KI, Kupas Tuntas Pentingnya Paten Bagi Inovator



Banjarmasin, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kembali menunjukkan komitmen dalam mendorong lahirnya inovasi di daerah. Pada Senin (25/8), jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel mengikuti Webinar OKE (Obrolan Kreatif dan Edukatif) KI bertajuk “Menggali Inovasi, Mengamankan Kreasi: Pelayanan Teknis Paten” yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi Waskita Trisna Utama, Pemeriksa Paten Madya, hadir sebagai narasumber dan menekankan bahwa paten bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga merupakan aset strategis.

“Paten melindungi hasil karya intelektual sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Inovasi yang dilindungi paten bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas,” ujar Dwi Waskita dalam paparannya.

Peserta webinar, yang terdiri dari Kepala Bidang dan tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, mendapatkan pemahaman praktis mengenai prosedur pendaftaran paten secara elektronik, kelengkapan dokumen, hingga strategi menyusun deskripsi invensi yang sesuai standar agar lebih mudah diterima.

Riswandi, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, menyambut baik kegiatan ini.

“Materi yang disampaikan sangat aplikatif dan bermanfaat bagi kami. Dengan bekal pengetahuan ini, kami dapat memberikan layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran paten yang lebih berkualitas kepada masyarakat di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, semakin banyak karya masyarakat yang berhasil didaftarkan, semakin kuat pula perlindungan hukum yang dimiliki serta potensi ekonomi yang bisa digali.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam webinar ini sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem inovasi di daerah, sekaligus memastikan bahwa karya masyarakat tidak hanya diakui, tetapi juga terlindungi dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang.





Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Gelar Rapat Perumusan Hasil Anev Perda PLP2B di Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Perumusan Hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada Selasa (26/08/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum, Sri Yunita, dengan dihadiri anggota tim serta para undangan dari instansi terkait termasuk Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Selatan. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program pembinaan hukum di wilayah tahun 2025, sekaligus tahapan akhir sebelum penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kerja memaparkan hasil kajian terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Kajian ini menekankan pentingnya menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional, khususnya di Kalimantan Selatan yang memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan.

Melalui rapat ini, diidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi, hingga keterbatasan dukungan anggaran dan partisipasi masyarakat. Tim Kerja juga menyusun rekomendasi perbaikan, antara lain perlunya harmonisasi perda dengan peraturan lebih tinggi, pemutakhiran data lahan berbasis sistem informasi digital, serta pemberian insentif bagi petani yang mempertahankan fungsi lahan pertanian.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ia menekankan bahwa analisis dan evaluasi hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan Perda yang dihasilkan benar-benar bermanfaat, adil, dan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam menjaga ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Rapat perumusan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas regulasi, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Bersama Bupati HST, Kemenkum Kalsel Komitmen Wujudkan Posbankum untuk Masyarakat



Barabai, Humas_Info – Setelah sebelumnya melaksanakan audiensi bersama Bupati Barito Kuala, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melanjutkan kegiatan serupa dengan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) dalam rangka penguatan layanan pembinaan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan berlangsung pada Selasa (27/8) di Kantor Bupati HST.

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Paralegal Justice Award.

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa pembentukan Posbankum menjadi wujud nyata kehadiran hukum di tengah masyarakat. Posbankum berfungsi sebagai pusat informasi hukum, layanan mediasi dan negosiasi, pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, hingga rujukan advokasi.

“Kami berharap setiap desa dan kecamatan di HST dapat memiliki Posbankum, sehingga akses terhadap keadilan semakin dekat dengan masyarakat,” ujar Alex.

Audiensi diterima langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, yang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fajar, Kepala Dinas PMD, Edy Rahmawan, dan Kabag Hukum, Taufik Rahman. Bupati HST menyampaikan dukungan penuh atas gagasan pembentukan Posbankum. Menurutnya, keberadaan Posbankum sejalan dengan program peningkatan kapasitas kepala desa dan camat, khususnya dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal.

“Kami mendukung penuh inisiatif ini. Selanjutnya, Kepala Dinas PMD akan mengoordinasikan kepada kepala desa dan perangkat daerah untuk segera membentuk SK Posbankum dan mengikutsertakan perwakilan dalam pelatihan paralegal. Hal ini penting agar masyarakat desa benar-benar merasakan manfaat dari akses keadilan,” ungkap Samsul Rizal.

Rangkaian audiensi ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel untuk terus memperluas jangkauan akses keadilan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, berdaya, dan mandiri dalam menyelesaikan permasalahan.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Bapperida Balangan Gelar FGD Kekayaan Intelektual



Banjarbaru, Info_Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penajaman Kekayaan Intelektual (KI) Lainnya yang diselenggarakan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Balangan pada Selasa (26/8) di Hotel Rhodita, Banjarbaru.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bapperida Balangan, H. Rakhmadi Yusni, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mendorong perlindungan serta pemanfaatan KI.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan KI, Riswandi, menyampaikan paparan umum mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan daya saing produk daerah.

“Kekayaan Intelektual bukan hanya melindungi hasil karya masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi. Dengan perlindungan KI, produk daerah bisa lebih dipercaya, terhindar dari pemalsuan, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Riswandi.

Sementara itu, M. Aji Rifani, Analis Permohonan KI Ahli Muda, menjelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis KI seperti Hak Cipta, Merek, dan Merek Kolektif, termasuk mekanisme pendaftarannya. Menurutnya, keberadaan Merek Kolektif sangat penting untuk menjaga kualitas serta memperkuat citra produk khas daerah.

Peserta FGD yang berasal dari instansi pemerintah daerah maupun lembaga pengelola KI aktif berdiskusi mengenai tantangan pendaftaran KI, khususnya terkait Hak Cipta dan Merek.

Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama pemerintah daerah, semakin meningkat untuk mendorong produk-produk lokal memiliki manfaat ekonomi yang lebih baik dan perlindungan hukum yang kuat.



Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Kesadaran Keamanan Siber: Kementerian Hukum Perkuat Pertahanan Digital



Banjarmasin, Humas_Info – Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum menyelenggarakan Sosialisasi Kesadaran Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Tim Kerja Kehumasan dan Teknologi Informasi.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Pusdatin, Rifqi Adrian Kriswanto, menyoroti ancaman serangan siber yang terus meningkat di Indonesia. Disebutkan bahwa berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tercatat 67 juta serangan siber terjadi sepanjang tahun ini.

“Serangan siber dapat terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital, sehingga seluruh aparatur harus waspada dan sigap menghadapi ancaman tersebut,” tegas Rifqi dalam sambutannya.

Sebagai langkah nyata, pada 22 Juli 2025 Kementerian Hukum resmi bergabung dengan Tim Tanggap Insiden Siber Nasional bersama 42 instansi pemerintah dan sektor strategis lainnya di bawah koordinasi Government Computer Security Incident Response Team (GCIRT).

Dalam sosialisasi ini, para peserta dibekali pemahaman praktis mengenai cara mendeteksi dan menangani potensi ancaman siber. Materi yang diberikan antara lain mencakup metode pemindaian perangkat, identifikasi malware, serta penerapan langkah pencegahan agar sistem digital kementerian tetap aman.

Sebagai tindak lanjut, Pusdatin menekankan pentingnya pengendalian teknologi informasi dalam mendukung pencapaian Target Kinerja Kementerian Hukum. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pemetaan dan pembatasan penggunaan perangkat lunak pada komputer, laptop, maupun smartphone, baik yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) maupun yang dimiliki secara pribadi.

Selain itu, koneksi internet melalui jaringan Pusdatin juga direncanakan hanya akan diperbolehkan bagi perangkat yang telah terdaftar MAC Address-nya. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat pengamanan data dan jaringan Kementerian Hukum sekaligus mencegah pencurian serta penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan kesadaran dan kewaspadaan seluruh jajaran terhadap ancaman digital semakin meningkat, sehingga pertahanan siber Kementerian Hukum dapat semakin tangguh.

Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Sertifikat “Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” pada Puncak Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar



Martapura, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut hadir dalam Puncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Kabupaten Banjar Tahun 2025 yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ratu Zalecha Martapura, Rabu (27/8).

Kegiatan dihadiri Bupati Banjar beserta jajaran Pemerintah Kabupaten, pimpinan DPRD, Forkopimda, perangkat daerah terkait, serta pengurus Dekranasda Kabupaten Banjar. Dari Kanwil Kemenkum Kalsel, hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, bersama tim Helpdesk Kekayaan Intelektual.

Pada momen penyerahan penghargaan, Kadiv Yankum secara resmi menyerahkan Sertifikat Penghargaan “Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Banjar sebagai bentuk dukungan terhadap pemajuan UMKM lokal dan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Dalam sambutannya, Bupati Banjar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pembangunan daerah, sementara Gubernur Kalimantan Selatan menekankan pentingnya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing ekonomi kreatif daerah.

Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini menegaskan komitmen untuk terus mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual bagi UMKM dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjar.



DPRD Purworejo Lakukan Studi Banding ke Kanwil Kemenkum Kalsel, Diskusi Harmonisasi Produk Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka studi banding, Rabu (27/8/2025), bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta pejabat manajerial dan non manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Rangkaian acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama, sambutan hingga diskusi interaktif.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Kalsel Alex Cosmas Pinem menyampaikan rasa bangga dan kehormatan atas kedatangan DPRD Purworejo. Ia menekankan pentingnya silaturahmi serta pertukaran informasi terkait tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

“Salah satu misi Kementerian Hukum adalah membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan mampu melindungi kepentingan nasional. Analisis konsepsi dilakukan dengan mengukur keharmonisan menggunakan 10 indikator dimensi harmonisasi,” ujar Alex.

Lebih lanjut, Alex menekankan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan Kementerian Hukum dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, yang menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat serta kesempatan untuk melakukan studi banding terkait pelaksanaan harmonisasi ranperda dan ranperkada.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Purworejo, Danan Purnomo, menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas legislatif daerah dalam merumuskan perda yang lebih berkualitas. “Kami mendapatkan banyak masukan berharga, khususnya terkait metodologi analisis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat membantu Bapemperda dalam menjalankan fungsi legislasi agar produk hukum yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ungkap Danan.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, berlangsung sharing knowledge yang mendalam antara jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dengan Komisi I DPRD Purworejo. Berbagai pengalaman dan permasalahan di daerah Purworejo dikupas untuk menemukan solusi melalui perspektif hukum.

Kegiatan kunjungan kerja ini berjalan lancar dan diakhiri dengan penyerahan cinderamata serta foto bersama sebagai wujud penguatan hubungan kelembagaan.

Menteri Hukum Minta Tertib Proses Permohonan Pewarganegaraan Dalam Seluruh Tahapan



Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) memastikan proses pewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang asing dilakukan secara tertib di semua tahapannya. Upaya ini ditandai dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 TAHUN 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan tanggal 31 Juli 2025.

Dalam SE itu, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, meminta kepada seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum untuk melaksanakan pedoman tertib proses pewarganegaraan, mulai dari tahapan pemeriksaan kelengkapan administratif, pemeriksaan substantif, sampai pada proses pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pemohon.

Selain itu, isi SE juga memerintahkan jajaran Kemenkum di Kanwil agar menerapkan prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kanwil juga harus memastikan bahwa pemohon pewarganegaraan tidak sedang menjalani proses hukum baik di Indonesia maupun di negara asal, sekaligus memastikan seluruh dokumen persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan. Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Dulyono, mengatakan masih banyak ditemukan ketidakseragaman dari hasil pelaksanaan pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif dalam rangka tertib administrasi terhadap proses pewarganegaraan Republik Indonesia. Menurutnya dibutuhkan penguatan pengawasan terhadap kewajiban pemohon untuk mengembalikan dokumen kewarganegaraan dan surat-surat keimigrasian atas namanya.

"Terbitnya Surat Edaran Nomor: M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman kita bersama baik yang ada di pusat maupun di Kanwil untuk memberikan pelayanan bagi pewarganegaraan bagi masyarakat," kata Dulyono saat membuka Sosialisasi Surat Edaran Nomor: M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025, di Jakarta, Kamis (14/08/25).

Dia menambahkan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, Kanwil diimbau untuk memastikan pemohon pewarganegaraan tidak sedang menjalani proses hukum, baik di Indonesia maupun negara asal. Kanwil juga harus proaktif dalam memastikan bahwa pemohon pewarganegaraan yang telah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan dokumen kewarganegaraan kepada kedutaan negara asal pemohon atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

"Saya berharap seluruh proses pewarganegaraan dalam setiap tahapan semakin baik, tertib administrasi, dan mencegah adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti pemalsuan dokumen persyaratan serta memastikan bahwa orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia hanya menggunakan satu identitas sebagai Warga Negara Indonesia dimanapun berada dan sudah tidak menggunakan identitas dari negara asalnya. Dan semoga Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik diterbitkannya Surat Edaran Menteri Hukum tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan. Menurutnya, pedoman tersebut menjadi acuan penting dalam memastikan setiap tahapan permohonan pewarganegaraan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerancuan di lapangan.

"Kami di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen melaksanakan arahan Bapak Menteri dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pemeriksaan administratif, pemeriksaan substantif, hingga pengucapan sumpah atau janji setia. Prinsip kehati-hatian dan kecermatan akan terus kami kedepankan agar proses pewarganegaraan benar-benar tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon," ungkap Alex.



Penguatan Jabatan Fungsional Bidang Hukum, Setda Barito Kuala Lakukan Konsultasi ke Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menerima kunjungan jajaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Kuala. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi untuk Jabatan Fungsional mengenai Pemetaan Jabatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Perancang Perundang-undangan serta Penyuluh Hukum.

Kedatangan jajaran Setda Kabupaten Barito Kuala disambut langsung oleh Bahjahtul Mardiah selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan ini, Bahjahtul Mardiah menyampaikan bahwa kegiatan konsultasi dan koordinasi ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme jabatan fungsional di daerah.

“Melalui forum diskusi ini, kita dapat saling bertukar informasi, sekaligus memastikan bahwa pemetaan jabatan dan kenaikan jenjang jabatan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan diskusi mendalam mengenai pengembangan jabatan fungsional, termasuk mekanisme pemetaan jabatan dan prosedur kenaikan jenjang. Diskusi berlangsung interaktif dengan pertukaran pengalaman antara kedua belah pihak.

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, sekaligus memperkuat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Pembahasan Rencana Aksi Ditjen AHU Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kanwil Kemenkum Kalsel melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengikuti Rapat Pembahasan Rencana Aksi Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun 2025, pada Rabu (27/08) di Ruang BerAkhlak Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut diikuti oleh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dengan Kanwil Kalsel menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari, beserta staf dan helpdesk Pelayanan AHU.

Dalam rapat, Ditjen AHU menyampaikan rencana penerbitan Surat Edaran terkait registrasi ulang akun notaris, sehingga pelaporan dengan kode B08 ditunda sementara waktu. Penundaan dilakukan karena aplikasi registrasi ulang notaris masih dalam tahap penyempurnaan oleh Direktorat Teknologi Informasi. Selain itu, Ditjen AHU juga memaparkan sejumlah rencana aksi strategis, meliputi sosialisasi registrasi ulang akun notaris, verifikasi dan validasi data notaris, sosialisasi penggunaan aplikasi SIMPALNOT, evaluasi pelaporan notaris, serta pembentukan Satgas Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah.

Lebih lanjut, Ditjen AHU mendorong penguatan peran Kanwil melalui pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan yang masuk. Rapat ini juga membahas strategi optimalisasi peningkatan PNBP, dengan menekankan agar Kanwil lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan publikasi layanan AHU kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Selain itu, fokus utama pembahasan turut menyinggung peningkatan kepatuhan notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia serta penanganan perbedaan data antara Ditjen AHU dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ditjen AHU juga menegaskan telah membentuk Satgas Pengawasan PNBP Fidusia yang tengah menindaklanjuti penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan OJK. Langkah tersebut merupakan upaya penguatan pengawasan sekaligus penyusunan strategi agar pelaksanaan tugas Satgas dapat berjalan seragam di seluruh Kanwil.

Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Terima Kunjungan Korwil PERADI Kalsel-Teng



Banjarmasin, Humas_Info – Koordinator Wilayah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kalimantan Selatan - Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan resmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada Kamis (28/08), bertempat di Ruang Kerja Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kehadiran para pengurus PERADI tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari. Dari pihak PERADI turut hadir Koordinator Wilayah, H. Edi Sucipto, beserta jajaran pengurus dan anggota PERADI Kalimantan Selatan.

Kunjungan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergitas antara PERADI dengan Kanwil Kemenkum dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, PERADI menyampaikan bahwa jumlah advokat yang berpraktik di wilayah Banjarmasin saat ini mencapai sekitar 400 orang, sebuah potensi besar yang dapat didayagunakan dalam memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai daerah agar layanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan merata.

Selain itu, PERADI menekankan pentingnya optimalisasi peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang saat ini berjumlah 11 lembaga di Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan bantuan hukum bagi masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, PERADI berkomitmen mendorong berdirinya lebih banyak LKBH sekaligus memfasilitasi pelatihan dan penguatan kapasitas bagi advokat maupun kader paralegal justice. Paralegal dipandang sangat strategis dalam memberikan layanan awal berupa konsultasi, mediasi, serta advokasi dasar di daerah yang belum terjangkau advokat.

Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas inisiatif PERADI dan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diusulkan, termasuk pembentukan Posbakum di Kalimantan Selatan. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan paralegal untuk memperluas jangkauan layanan hukum dan mengisi kekosongan akses hukum di masyarakat.

"Melalui sinergitas PERADI dan Kanwil Kemenkum Kalsel, diharapkan layanan bantuan hukum di Kalimantan Selatan dapat berjalan semakin terukur, berkualitas, dan inklusif, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat," pungkasnya.



Kemenkum Kalsel Gelar Bimtek Pengelolaan JDIH, Kakanwil: Harus Jadi Etalase Hukum Daerah yang Membanggakan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembinaan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025, dengan melibatkan pengelola JDIH dari berbagai instansi daerah. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem.

Dalam sambutannya, Alex menegaskan pentingnya JDIH sebagai instrumen keterbukaan informasi publik di bidang hukum. “Informasi hukum yang cepat, tepat, akurat, dan mudah diakses adalah suatu keharusan. JDIH hadir bukan hanya sebagai wadah dokumentasi, tetapi juga sebagai jaringan pengetahuan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Alex menjelaskan bahwa keberadaan JDIH telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH dan regulasi turunannya. Lebih dari itu, JDIH berfungsi menjamin kepastian hukum, menjadi sarana edukasi hukum, mendukung perumusan kebijakan berbasis data, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan pengelolaan JDIH di lingkup pemerintah daerah maupun instansi vertikal. “Kami mendorong sinergi, asistensi, serta monitoring agar pengelolaan JDIH di Kalimantan Selatan sesuai standar nasional dan menjadi pusat rujukan hukum bagi instansi daerah,” tambahnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum yang membawakan materi strategis, antara lain evaluasi anggota JDIH di Kalimantan Selatan, standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, strategi pengelolaan JDIH berbasis teknologi informasi, integrasi JDIH melalui API, standar metadata, hingga aspek penilaian kinerja JDIH yang mencakup 29 indikator pengelolaan. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait penguatan literasi hukum, pemanfaatan pojok JDIH di desa, serta inovasi pengelolaan aplikasi berbasis mobile.

Alex juga menekankan agar seluruh anggota JDIH di Kalimantan Selatan segera terhubung dengan portal nasional JDIH sehingga masyarakat memperoleh informasi hukum yang lengkap, valid, mutakhir, dan terstandar. Ia mendorong agar pengelola terus berinovasi menghadirkan JDIH dalam bentuk aplikasi digital yang user friendly dan mampu terintegrasi dengan big data hukum. “Keberhasilan JDIH tidak hanya diukur dari ada tidaknya portal hukum, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya. Mari jadikan JDIH sebagai etalase hukum daerah yang membanggakan, dengan pengelolaan yang inovatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tegas Alex.

Melalui Bimtek ini, Alex berharap kapasitas pengelola JDIH semakin meningkat dan mampu menghadirkan layanan hukum yang berkualitas. “Saya yakin, dengan kerja sama solid antara Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, dan instansi terkait, JDIH Kalimantan Selatan dapat menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan menjadi model pengelolaan informasi hukum digital yang patut dicontoh,” pungkasnya.



Kementerian Hukum Gelar Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025: Mayoritas K/L Raih Predikat Istimewa



Jakarta, 28 Agustus 2025 – Kementerian Hukum melalui Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum menggelar Penilaian Nasional Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Sari Pasifik Jakarta, 25–28 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta tindak lanjut dari Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Kepala BSK Hukum, Andry Indrady, menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan hukum adalah fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

“Melalui Indeks Reformasi Hukum, kita berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berorientasi pada hasil, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

IRH menjadi instrumen untuk mengukur keberhasilan reformasi hukum melalui identifikasi, pemetaan, deregulasi, dan penguatan sistem regulasi di Indonesia. Penilaian ini berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memastikan regulasi relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat.

Hasil sementara penilaian menunjukkan capaian yang mengembirakan:

- Kategori Kementerian/Lembaga (K/L):
Sebanyak 66 K/L (71,0%) meraih predikat AA (Istimewa), dengan 12 K/L di antaranya memperoleh nilai sempurna (100).
(Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 hanya terdapat 2 K/L dan tahun 2024 sebanyak 11 K/L yang meraih nilai sempurna).

- Kategori Pemerintah Daerah (Pemda):
Sebanyak 99 Pemda (17,9%) berhasil memperoleh predikat AA (Istimewa), dengan 9 Pemda meraih nilai sempurna (100).

(Pada tahun 2023 tidak ada Pemda yang meraih nilai sempurna, sedangkan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 Pemda).

Dalam sambutan penutupnya, Andry menekankan bahwa penilaian IRH tidak hanya sebatas evaluasi, melainkan refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia.

“Hasil kegiatan ini harus menjadi pijakan dalam mempercepat transformasi hukum, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan cita-cita besar mewujudkan *‘World Class Government’*,” tegasnya.

Mulai tahun 2026–2029, kegiatan ini tidak hanya menjadi program prioritas Kementerian Hukum, tetapi juga akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dengan ditutupnya kegiatan Penilaian IRH 2025, Kementerian Hukum mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan kerja sama, sinergi, dan komitmen dalam membangun sistem hukum nasional yang responsif, inklusif dan berkeadilan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut menyambut baik hasil penilaian nasional tersebut.

“Capaian ini menunjukkan arah reformasi hukum kita semakin nyata. Kami di daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil agar setiap kebijakan hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.



Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Dua Rancangan Peraturan Bupati Tapin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan Rapat Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Tapin, yakni tentang Kelas Jabatan serta Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Kegiatan berlangsung di Balai Pertemuan Garuda pada Kamis (28/8).

Rapat dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, dan dipimpin langsung oleh Ketua Kelompok Kerja Harmonisasi 2, Bahjatul Mardhiah. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapin, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan, BKPSDM, Dinas Sosial, Bagian Organisasi, serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, Zainal Abidin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat ini sebagai langkah penting dalam penyempurnaan regulasi daerah.

Pembahasan pertama menyoroti Raperbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel memberikan masukan mulai dari judul, konsiderans, hingga batang tubuh, sekaligus menekankan pentingnya sinkronisasi dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum.

Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada Raperbup tentang Kelas Jabatan. Tim harmonisasi meninjau aspek teknis berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 39 Tahun 2013, khususnya terkait pengaturan nilai dan kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Rapat ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai simbol komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas, selaras, dan aplikatif.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ajak UMKM Tanah Laut Lindungi Produk Lewat Kekayaan Intelektual



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Kamis (28/8) di Hotel Aeris, Banjarbaru.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, pelaku UMKM, komunitas budaya, serta akademisi lokal. Tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, terhadap pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam sesi utama, Meidy Firmansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, membawakan materi berjudul “Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Tanah Laut”. Ia menekankan bahwa produk khas daerah seperti kuliner, kerajinan, dan seni tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran KI.

“Kekayaan Intelektual bukan sekadar dokumen administratif, tetapi sebuah instrumen penting untuk melindungi sekaligus mengangkat nilai ekonomi produk daerah. Dengan adanya perlindungan KI, potensi lokal Tanah Laut bisa lebih dikenal, terhindar dari klaim pihak lain, dan memiliki daya saing di pasar nasional maupun global,” ujar Meidy Firmansyah.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti pentingnya edukasi, penyediaan klinik KI, inventarisasi kekayaan intelektual komunal, serta strategi branding melalui pendaftaran merek dan indikasi geografis.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan konsultasi terbuka, di mana pelaku UMKM dan komunitas budaya dapat langsung berdiskusi mengenai kendala maupun peluang pendaftaran KI untuk produk mereka.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif dan langkah nyata dalam memperkuat perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Tanah Laut.





Kemenkum Kalsel Terima Hasil Audit Ketaatan Pengelolaan BMN Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima penyampaian hasil Audit Ketaatan atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) periode audit Tahun Anggaran 2025 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Audit ini dilaksanakan sejak 25 Agustus 2025 di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Audit tersebut menyoroti sejumlah aspek penting pengelolaan BMN, antara lain penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, serta sistem pengendalian. Dari hasil audit, ditemukan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan akuntabilitas, ketertiban administrasi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan BMN.

Penyampaian hasil audit oleh Tim Itjen dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, serta jajaran Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN, Tim Kerja Perencanaan Anggaran dan Laporan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Alex Cosmas Pinem menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan audit ini. Ia menegaskan bahwa rekomendasi dari Tim Itjen akan segera ditindaklanjuti untuk memperkuat tata kelola BMN di Kanwil Kemenkum Kalsel.

"Kami menyambut baik hasil audit yang telah disampaikan. Temuan yang ada menjadi pengingat dan masukan bagi kami untuk terus meningkatkan pengawasan, penertiban administrasi, serta optimalisasi pemanfaatan BMN. Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi Tim Itjen demi mewujudkan pengelolaan aset negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan," ujar Alex.

Melalui pelaksanaan audit ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat memperkuat manajemen BMN sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik di Kalimantan Selatan.



Kemenkum Kalimantan Selatan Dorong Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Seluruh Kelurahan Kota Banjarmasin



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Aula Kayuh Baimbai, Kamis (28/8). Kegiatan ini diikuti oleh 52 Lurah dan 5 Sekretaris Camat se-Kota Banjarmasin.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Banjarmasin, Machli Riyadi, yang membacakan sambutan Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR. Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Melalui pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan, kami ingin memastikan masyarakat tidak sendirian ketika menghadapi persoalan hukum. Mereka memiliki tempat untuk bertanya, mendapat pendampingan, hingga memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton E. Wardhana, menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum di desa/kelurahan merupakan program prioritas pemerintah. Hingga kini, tercatat sudah ada 98 Posbankum yang tersebar di 2.015 desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan, termasuk 15 Posbankum yang telah terbentuk dari 52 kelurahan di Kota Banjarmasin.

“Posbankum hadir untuk memberikan layanan informasi hukum dan konsultasi, advokasi, mediasi penyelesaian sengketa, serta rujukan hukum. Kehadiran Posbankum menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat,” jelas Anton.

Kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin ini juga dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, Iwan Fitriadi, serta diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Melalui sinergi antara Kemenkum Kalimantan Selatan dan Pemko Banjarmasin, diharapkan Posbankum dapat segera terbentuk di seluruh kelurahan sebagai wujud nyata peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan bagi masyarakat.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Futsal Jumat Krida, Tingkatkan Kekompakan Pegawai



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan futsal bersama dalam rangka Jumat Krida yang bertempat di Borneo Indoor Futsal, Jumat (29/8).

Kegiatan olahraga ini diikuti dengan antusias oleh para pegawai dari berbagai divisi, termasuk Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Anton Edward Wardhana. Pertandingan berlangsung penuh semangat dan keakraban, menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan antarpegawai di luar suasana kerja kantor.

Kadiv P3H Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa olahraga bersama ini bukan hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan antarpegawai. “Melalui futsal Jumat Krida ini, kita bisa meningkatkan kekompakan, melatih sportivitas, dan menjaga semangat positif yang nantinya berdampak pada kinerja kita di kantor,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berupaya menumbuhkan semangat sportivitas, menjaga kesehatan jasmani, serta memperkuat kerja sama tim yang selaras dengan semangat pembangunan budaya kerja positif di lingkungan Kemenkum.

Jumat Krida menjadi agenda rutin yang digelar sebagai sarana pelepas penat sekaligus membangun solidaritas di antara seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel.





Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang



Banjarmasin, Info Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Layanan Kekayaan Intelektual melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pendaftaran merek dagang. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (30/8/2025) di Koperasi Pemasaran Dangsanak Kriya Katupat, Banjarmasin.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerja sama dengan Universitas Poliban Banjarmasin melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan menghadirkan pemateri Nurkesuma Febby Ikaningtiyas, Analis Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, didampingi langsung oleh Kepala Bidang Layanan Kekayaan Intelektual, Riswandi.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan mengenai pengertian merek, alur pendaftaran, dokumen yang dipersyaratkan, serta mekanisme pendampingan pendaftaran merek dagang. Para anggota Koperasi Dangsanak Kriya Katupat yang merupakan pelaku UMKM juga diberikan kesempatan untuk melakukan tanya jawab.

Sedikitnya 35 pelaku UMKM hadir dalam kegiatan ini. Menariknya, panitia juga memberikan doorprize berupa subsidi pendaftaran permohonan merek dagang kepada dua orang peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, secara terpisah turut menyambut terselenggaranya kegiatan dan menegaskan pentingnya perlindungan merek bagi pelaku usaha.

“Pendaftaran merek dagang adalah langkah strategis untuk melindungi hasil karya UMKM sekaligus meningkatkan nilai jual produk mereka. Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus mendampingi dan memfasilitasi para pelaku usaha agar memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang. Dengan begitu, UMKM lokal dapat lebih berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, mengapresiasi semangat para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan.

“Kami melihat antusiasme yang tinggi dari para pelaku UMKM dalam kegiatan pendampingan ini. Banyak dari mereka yang baru memahami bahwa merek memiliki peran besar dalam menjaga identitas dan keberlangsungan usaha. Melalui sosialisasi ini, kami berharap para pelaku UMKM semakin termotivasi untuk segera mendaftarkan mereknya, sehingga usaha mereka terlindungi secara hukum dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tuturnya.

Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan para pelaku UMKM di Banjarmasin, khususnya anggota Koperasi Pemasaran Dangsanak Kriya Katupat, semakin memahami pentingnya merek dagang sebagai aset berharga dalam meningkatkan nilai merek dan daya saing ekonomi lokal.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/@kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id